

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan mitigasi bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peran sebagai Regulator, pemerintah daerah telah meletakkan landasan hukum yang esensial melalui penyusunan peraturan daerah serta kebijakan tata ruang yang berbasis pada peta risiko bencana. Peran regulatif ini menjadi pembuka jalan yang legal bagi instansi teknis seperti BPBD untuk melakukan intervensi pengawasan, mulai dari penegakan standarisasi bangunan tahan gempa (*building code*) hingga pengendalian izin lingkungan, demi menekan tingkat kerentanan fisik maupun ekologis di wilayah yang rawan terhadap guncangan tektonik dan hidrometeorologi ini.
2. Peran sebagai pelayan publik, pemenuhan peran sebagai pelayan publik menjadi bukti konkret kehadiran negara dalam menjamin hak atas rasa aman bagi seluruh warga Bengkulu Selatan. Pelayanan ini diwujudkan melalui penyediaan sistem informasi kebencanaan yang inklusif, pemeliharaan sistem peringatan dini yang andal di kawasan pesisir, serta pembangunan infrastruktur fisik seperti tanggul penahan abrasi dan jalur evakuasi yang jelas. Melalui manajemen kesiapsiagaan yang responsif dan penyediaan prasarana yang memadai, pemerintah daerah mampu

meminimalkan jeda waktu kedaruratan sehingga fatalitas serta dampak kerugian sosial-ekonomi akibat bencana dapat direduksi secara optimal.

3. Peran sebagai pemberdaya masyarakat, keberlanjutan dan keberhasilan dari seluruh kebijakan tata kelola risiko bencana ini sangat ditentukan oleh sejauh mana peran pemberdayaan masyarakat mampu dihidupkan di tingkat tapak. Melalui program sosialisasi yang masif, simulasi berkala, serta pembentukan lembaga berbasis komunitas seperti Desa Tangguh Bencana (Destana), Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berhasil mengubah paradigma masyarakat dari sekadar objek pasif menjadi subjek mandiri yang memiliki ketangguhan. Ketika masyarakat telah berdaya dan dilibatkan secara aktif dalam perencanaan mitigasi, maka akan tercipta sinergi yang kokoh antara otoritas birokrasi dan kearifan lokal yang menjadi kunci utama keselamatan wilayah dalam menghadapi setiap ancaman bencana alam di masa depan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan mitigasi bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Sektor Regulator), disarankan kepada Pemerintah Daerah bersama DPRD untuk segera melakukan pembaruan berkala pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan mengintegrasikan peta risiko bencana terbaru dari

BMKG dan BNPB secara berkala agar regulasi pemanfaatan ruang tetap adaptif terhadap dinamika geologis wilayah pesisir dan perbukitan.

2. Bagi BPBD dan Instansi Terkait (Sektor Pelayanan Publik), pelayanan informasi dan edukasi kebencanaan disarankan untuk memanfaatkan platform digital (seperti aplikasi atau media sosial resmi daerah) yang dikemas secara interaktif dan inklusif, sehingga materi mitigasi mudah dipahami oleh kelompok rentan termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
3. Bagi Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Sektor Pemberdaya Masyarakat)

Masyarakat bersama pemangku adat di Bengkulu Selatan disarankan untuk menghidupkan kembali kearifan lokal yang berkaitan dengan tanda-tanda alam prabencana, lalu mengombinasikannya dengan latihan simulasi mandiri secara berkala di tingkat rukun tetangga (RT) atau desa guna menjaga kesiapsiagaan refleksi komunitas.